Green Accounting dalam Pengelolaan Biaya Lingkungan: Evaluasi Penerapan *Environmental Management Accounting*

Anisah Alifah Alfiyyah Rukmana[1*], Nur Asni[2], Safaruddin[3]
Universitas Halu Oleo, Indonesia
21anisaalifah.kuliah@gmail.com*, nur.asni@uho.ac.id, safaruddin@uho.ac.id

Info Artikel:
Diterima 16 Juli 2026
Direview 07 Oktober 2026
Disetujui 20 Oktober 2026

Keywords:
Environmental Costs, Green Accounting, Weste Manangement.

ABSTRACT

Purpose*– This study aims to evaluate the implementation of Green Accounting at RSUD Konawe, particularly in the processes of identifying, classifying, and disclosing environmental costs arising from waste management activities through the perspective of Environmental Management Accounting (EMA).*

Design/methodology*– This study employed a descriptive qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation. The informants consisted of the Head of the Finance Subdivision, a finance staff member, and the Head of Environmental Health (Kesling) at RSUD Konawe. The data were analyzed using the Environmental Management Accounting (EMA) framework through the Planning, Budgeting, Implementation, Operation, Evaluation, and Follow-up (PPOPET) approach.*

Findings– *RSUD Konawe has implemented environmental management through waste segregation, B3 waste treatment, IPAL, and 3R practices. However, Green Accounting remains partial, as environmental costs are embedded in general operational expenses without separate classification or disclosure. The EMA-PPOPET framework reveals that physical environmental activities are well implemented, but monetary information remains insufficiently integrated into the accounting system. This study contributes by integrating physical and monetary environmental activities in a regional public hospital context.*

Publishing Institution :
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Sumatera Selatan (30263)
E-Mail :
motivasi.feb.ump@gmail.com

Access this article online
Quick Response Code:
SCAN ME
Website:
http://ojs.um-palembang.ac.id/motivasi
p-ISSN:2548-1622
e-ISSN: 2716-4039Jurnal**MOTIVASI**

A. PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan yang semakin dirasakan masyarakat mendorong meningkatnya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di Indonesia, berbagai regulasi telah diterbitkan sebagai dasar pengelolaan lingkungan, khususnya pada sektor rumah sakit, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Menteri LHK Nomor P.56 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban rumah sakit dalam mengelola limbah secara baik guna mencegah pencemaran dan penularan penyakit. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama dalam pencatatan dan pelaporan biaya lingkungan yang belum transparan.

Secara global, penerapan *Green Accounting* telah menjadi isu sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan akuntabilitas lingkungan. Penelititan yang dilakukan oleh Parikh & Sodha (2025), menunjukkan bahwa

akuntansi lingkungan berperan dalam mengukur dan mengendalikan dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan, meskipun implementasinya masih belum merata antara negara maju dan berkembang. Di negara berkembang, keterbatasan regulasi, sumber daya, dan literasi menjadi hambatan utama dalam penerapannya.

Penerapan *Green Accounting* di sektor Kesehatan dalam konteks nasional, masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Meskipun beberapa rumah sakit mulai mengadopsi prinsip akuntansi lingkungan, implementasinya masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis (Ashari & Anggoro, 2021). Padahal, volume limbah medis di Indonesia tergolong tinggi, mencapai sekitar 296,86 ton per hari (Rachma et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan serta pelaporan biaya lingkungan yang lebih akuntabel. Di tingkat daerah, termasuk Sulawesi Tenggara, perhatian terhadap akuntansi lingkungan mulai berkembang, namun belum banyak diterapkan di sektor rumah sakit (Hamid & Garusu, 2024).

Konsep *Green Accounting* hadir sebagai pendekatan akuntansi modern yang memperhitungkan aspek ekonomi dan lingkungan secara bersamaan. *Green Accounting* berupaya membuat informasi tentang keuntungan dan kerugian aktivitas ekonomi bagi lingkungan menjadi lebih transparan. Dengan pengetahuan ini, bisnis dapat mengelola dampaknya terhadap lingkungan dan menggunakan sumber daya alam secara lebih efisien. Selain itu, masyarakat dan pemerintah dapat menggunakan data ini untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja bisnis terhadap lingkungan (Setiawati & Sisdianto, 2024). Akuntansi lingkungan juga menjadi sarana bagi rumah sakit untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan ekologis kepada publik (Samsiar et al., 2020).

Namun demikian, penerapan akuntansi lingkungan di rumah sakit masih menghadapi kendala, terutama belum adanya sistem pencatatan biaya lingkungan yang terstandarisasi dan terpisah dari biaya operasional umum. Hal ini menyebabkan biaya lingkungan sulit diidentifikasi dan dievaluasi secara spesifik. Penelitian Norsita (2021) menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan limbah telah dilakukan, biaya lingkungan belum disajikan secara khusus dalam laporan keuangan. Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Dengah et al. (2024) dan Ghifari & Rosidi (2018), yang menyatakan bahwa biaya lingkungan di rumah sakit masih digabung dalam biaya operasional umum tanpa adanya pelaporan khusus. Akibatnya, informasi biaya lingkungan menjadi kurang transparan dan menyulitkan evaluasi manajerial.

Penelitian mengenai *Environmental Management Accounting* (EMA) pada sektor rumah sakit menunjukkan bahwa informasi lingkungan perlu dilihat dari aspek fisik dan moneter. Refiyani & Putra (2023) misalnya, mengkaji penerapan EMA pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan menekankan kebutuhan informasi fisik dan moneter dalam pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah telah dilakukan, sementara informasi moneter lingkungan dianalisis melalui tahapan identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penelitian Sary et al., (2022) mengenai penerapan EMA pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang juga menganalisis informasi fisik, informasi moneter, dan kinerja lingkungan rumah sakit, serta menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan EMA dan klasifikasi biaya lingkungan. Sementara itu, penelitian Rachman & Nahartyo (2024) pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dan satu rumah sakit lainnya menunjukkan bahwa informasi fisik lingkungan relatif memadai, tetapi belum didukung oleh informasi moneter yang baik. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi informasi fisik dan moneter merupakan aspek penting dalam penerapan EMA di rumah sakit, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam pengintegrasian informasi tersebut ke dalam sistem pengelolaan dan akuntansi organisasi.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan *Green Accounting* dan akuntansi biaya lingkungan pada rumah sakit, penelitian tersebut menunjukkan variasi fokus, mulai dari identifikasi, klasifikasi, dan pengungkapan biaya lingkungan hingga analisis informasi fisik dan moneter serta pengelolaan lingkungan. Kajian-kajian tersebut memberikan pemahaman penting mengenai aktivitas dan informasi lingkungan di rumah sakit, tetapi masih terdapat ruang untuk memperdalam bagaimana informasi fisik dan moneter tersebut dihubungkan secara sistematis dalam suatu kerangka evaluasi yang menelusuri proses pengelolaan lingkungan dan keterkaitannya dengan sistem akuntansi rumah sakit. Dalam konteks tersebut, perspektif *Environmental Management Accounting* (EMA) dapat digunakan untuk menghubungkan informasi aktivitas lingkungan secara fisik dengan informasi moneter yang dihasilkan dari aktivitas tersebut.

Dalam perkembangan penelitian EMA pada rumah sakit, kerangka PPOPET telah digunakan untuk melihat penerapan pengelolaan lingkungan secara bertahap. Fitermen et al., (2025) misalnya, menerapkan pendekatan PPOPET pada pengelolaan limbah di RSUD Inche Abdoel Moeis Samarinda dan menunjukkan bahwa EMA digunakan melalui tahapan *Planning, Budgeting, Implementation, Operation, Evaluation,* dan *Follow-up*, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam alokasi biaya lingkungan dan sistem pelaporan internal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa PPOPET relevan untuk menganalisis proses pengelolaan lingkungan rumah sakit. Namun, penelitian ini menggunakan PPOPET dengan fokus yang lebih spesifik pada keterhubungan antara aktivitas fisik dan aktivitas moneter lingkungan. Dengan demikian, PPOPET dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk menelusuri tahapan pengelolaan lingkungan, tetapi juga untuk mengevaluasi bagaimana informasi aktivitas fisik dan biaya lingkungan diidentifikasi, dianggarkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti dalam sistem pengelolaan dan akuntansi rumah sakit.

RSUD Konawe dipilih sebagai lokasi studi kasus karena rumah sakit ini memiliki aktivitas pengelolaan lingkungan yang mencakup limbah domestik, limbah medis/B3, dan limbah cair, yang secara langsung menimbulkan konsekuensi biaya bagi organisasi. Berdasarkan pra-penelitian, aktivitas pengelolaan limbah telah dilaksanakan melalui pemilahan limbah, kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengangkutan dan pemusnahan limbah B3, serta pengelolaan limbah cair melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, biaya yang timbul dari aktivitas tersebut belum secara khusus diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diungkapkan sebagai biaya lingkungan dalam sistem akuntansi rumah sakit. Kondisi tersebut menjadikan RSUD Konawe relevan sebagai studi kasus untuk mengevaluasi kesenjangan antara pengelolaan lingkungan secara operasional dan integrasi informasi biaya lingkungan dalam sistem akuntansi. Pelaporan biaya lingkungan menjadi penting karena dapat membantu pengendalian biaya, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat akuntabilitas organisasi(Anam & Ramlah, 2020).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa studi EMA pada rumah sakit telah membahas informasi fisik, informasi moneter, klasifikasi biaya lingkungan, serta tahapan pengelolaan lingkungan melalui PPOPET. Namun, masih terdapat ruang untuk memperdalam bagaimana aktivitas fisik lingkungan dan aktivitas moneter tersebut dihubungkan secara sistematis dalam satu kerangka evaluasi, khususnya untuk melihat apakah informasi yang dihasilkan dari aktivitas pengelolaan lingkungan telah terintegrasi ke dalam sistem akuntansi rumah sakit. Dengan demikian, kesenjangan penelitian dalam studi ini tidak diletakkan pada ketiadaan penggunaan PPOPET atau ketiadaan kajian mengenai informasi fisik dan moneter, tetapi pada kebutuhan untuk mengintegrasikan kedua jenis informasi tersebut dalam kerangka EMA-PPOPET guna mengevaluasi hubungan antara pengelolaan lingkungan secara operasional dan pengelolaan biaya lingkungan dalam sistem akuntansi rumah sakit daerah.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka EMA-PPOPET untuk mengintegrasikan evaluasi aktivitas fisik dan aktivitas moneter lingkungan dalam konteks rumah sakit daerah. Penelitian ini menghubungkan kedua aspek tersebut untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara operasional dan integrasi informasi biaya lingkungan dalam sistem akuntansi rumah sakit. Dengan pendekatan tersebut, EMA-PPOPET digunakan tidak hanya untuk menelusuri tahapan pengelolaan lingkungan, tetapi juga untuk mengevaluasi keterhubungan antara aktivitas lingkungan, biaya yang timbul, serta proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Selain itu, *Institutional Theory* digunakan sebagai perspektif penjelas untuk memahami bagaimana tekanan koersif, normatif, dan mimetik memengaruhi implementasi *Green Accounting* di RSUD Konawe.

B. KAJIAN PUSTAKA

Institutional Theory

Teori institusional pertama kali dikembangkan oleh Thorstein Veblen melalui karyanya *The Theory of the Leisure Class* pada tahun 1899, yang meletakkan dasar pemikiran bahwa perilaku ekonomi dan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh rasionalitas, melainkan dibentuk oleh kebiasaan, norma, dan nilai sosial yang mengakar dalam masyarakat. Organisasi berupaya memperoleh legitimasi agar diakui sebagai entitas yang sah dan bertanggung jawab di mata publik, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurut Powell & DiMaggio (1983), homogenisasi

praktik organisasi berlangsung melalui tiga mekanisme utama yang disebut isomorphism, yaitu koersif, mimetik, dan normatif. Isomorfisme koersif muncul melalui tuntutan formal dari pemerintah dan regulator, seperti kewajiban pelaporan pengelolaan limbah dan kepatuhan terhadap standar kesehatan lingkungan. Isomorfisme mimetik terjadi ketika rumah sakit meniru praktik pengelolaan limbah dan pelaporan biaya lingkungan dari rumah sakit lain yang dianggap lebih maju atau sukses, khususnya dalam situasi ketidakpastian. Sementara itu, isomorfisme normatif bersumber dari profesionalisasi, seperti kode etik tenaga kesehatan, serta sistem akreditasi rumah sakit yang mewajibkan pemenuhan indikator mutu dan keselamatan lingkungan. Praktik lingkungan dalam organisasi juga membutuhkan dukungan internal agar inisiatif keberlanjutan dapat diterapkan secara efektif. Junaidi et al. (2024) menunjukkan bahwa dukungan manajemen dan keterlibatan karyawan memiliki peran dalam mendorong inovasi lingkungan dan penerapan inisiatif yang berorientasi pada keberlanjutan.

Green Accounting

Green Accounting atau akuntansi lingkungan merupakan sistem akuntansi yang memfokuskan pada pengelolaan dan pelaporan akun-akun terkait biaya lingkungan (Lako, 2019). *Green Accounting*, atau akuntansi lingkungan, merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan mengidentifikasi, mengukur, mencatat, merangkum, melaporkan, serta mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan objek, transaksi, peristiwa, atau dampak aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap perusahaan, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Penerapan konsep yang berorientasi pada lingkungan juga berkembang dalam praktik bisnis melalui berbagai pendekatan hijau. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengintegrasikan data akuntansi agar dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi (Abdullah et al., 2021).

Praktik *Green Accounting*

Aktivitas Fisik (*Physic Activity*) adalah aktivitas nyata dan operasional yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas lingkungan, aktivitas pencegahan, aktivitas pengelolaan limbah secara non-finansial (Huynh & Nguyen, 2024). Aktivitas Moneter (*Monetary Activity*) yaitu aspek lingkungan yang diukur dalam bentuk nilai dan dikaitkan dengan kinerja keuangan serta penghematan biaya seperti identifikasi biaya lingkungan, klasifikasi biaya lingkungan, pengungkapan biaya lingkungan (Huynh & Nguyen, 2024).

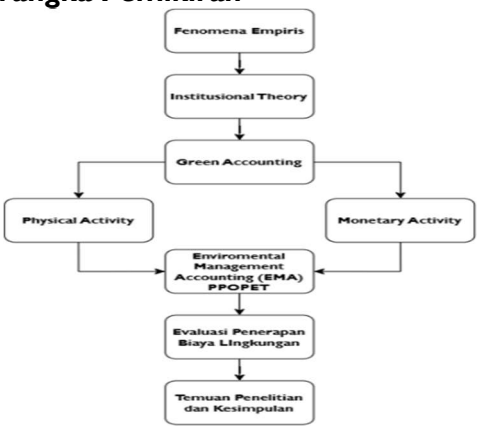
Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang secara khusus berkonsentrasi pada penyediaan data keuangan dan non-keuangan guna mendukung para manajer dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, serta pengendalian operasional organisasi.

Environmental Management Accounting (EMA)

Environmental Management Accounting (EMA) adalah suatu pendekatan akuntansi manajerial yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur (baik dalam informasi fisik maupun moneter), mengumpulkan, dan melaporkan informasi lingkungan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial yang mendukung efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan (Burrit Roger L & Schaltegger Stefan, 2021). Menurut Swalih et al. (2024) menyebut bahwa *Environmental Management Accounting* EMA memadukan data fisik (material flows, energi, limbah) dan data moneter (biaya lingkungan) untuk menyediakan kerangka informasi yang menyeluruh bagi keputusan strategis perusahaan/organisasi. Dalam penelitian Fitermen et al. (2025) menunjukkan bahwa rumah sakit menerapkan EMA melalui pendekatan PPOPET (*Planning, Budgeting, Implementation, Operation, Evaluation, dan Follow-up*). Meski demikian, penelitian itu juga mencatat bahwa detail alokasi biaya lingkungan masih terbatas dan sistem pelaporan internal lemah. Pendekatan PPOPET merupakan suatu kerangka manajerial yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu program atau kegiatan berjalan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan ini membantu organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, hingga menilai efektivitas suatu proses secara komprehensif.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Desain studi kasus dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai *implementasi Green Accounting* dalam pengelolaan biaya lingkungan pada RSUD Konawe sesuai dengan kondisi nyata organisasi. Objek penelitian adalah RSUD Konawe yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan, dokumen pengelolaan lingkungan, serta berbagai referensi ilmiah yang relevan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dan pemahaman informan terhadap pengelolaan keuangan dan aktivitas lingkungan di RSUD Konawe. Informan terdiri atas Kepala Subbagian Keuangan, staf keuangan, dan petugas Kesehatan Lingkungan (Kesling). Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dari perspektif keuangan dan operasional lingkungan, sehingga data mengenai aktivitas lingkungan dan biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah dapat dikaji secara lebih komprehensif. Untuk memperkuat transparansi dan validitas data kualitatif, profil informan disajikan menggunakan kode/inisial tanpa mencantumkan nama asli, yang meliputi jabatan atau posisi, masa kerja, serta relevansi kompetensi informan terhadap fokus penelitian.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Kode	Jabatan/ Posisi	Masa Kerja	Relevansi/ Kompetensi
1	Kepala Subbagian Keuangan	2 thn	Memahami perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan rumah sakit
2	Staf/Subbagian Keuangan	8 thn	Memahami proses administrasi, pencatatan, dan realisasi biaya
3	Kepala/Petugas Kesehatan Lingkungan	9 thn	Memahami aktivitas pengelolaan limbah dan aktivitas lingkungan rumah sakit

Sumber: RSUD Konawe, 2026.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi antar informan serta mengonfirmasi hasil wawancara melalui observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada 27 Januari 2026 dengan 3 (Tiga) sesi terhadap informan yang dipilih secara purposive. Setiap wawancara berlangsung selama sekitar 13-24 menit dan direkam atas persetujuan informan. Wawancara kemudian ditranskripsikan secara verbatim/ringkas sesuai fakta kemudian dilakukan proses coding dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang mengacu pada indikator *Environmental Management Accounting* (EMA), kerangka *Planning, Budgeting, Implementation, Operation, Evaluation, dan Follow-up* (PPOPET), serta *Institutional Theory*. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data (data reduction), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) sesuai model analisis Miles dan Huberman.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Konawe telah melaksanakan aktivitas lingkungan melalui perencanaan tahunan yang mencakup pengelolaan limbah domestik, limbah medis, dan limbah cair. Aktivitas tersebut meliputi penyediaan sarana kebersihan, pemilahan limbah medis, kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemusnahan limbah B3, serta pengolahan limbah cair melalui Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL). Seluruh aktivitas tersebut telah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sehingga pengelolaan lingkungan dilakukan secara sistematis.

Meskipun aktivitas pengelolaan lingkungan telah berjalan dengan baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut masih berorientasi pada aspek teknis operasional. Belum ditemukan SOP khusus mengenai pengelolaan biaya lingkungan maupun mekanisme akuntansi lingkungan yang terintegrasi. Dengan demikian, aktivitas lingkungan lebih banyak berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan pengembangan sistem pengelolaan biaya lingkungan.

Aktivitas Pencegahan Lingkungan

Aktivitas pencegahan lingkungan dilakukan melalui pengelolaan limbah domestik, limbah medis, dan limbah cair. Rumah sakit menyediakan fasilitas kebersihan, melakukan pemilahan limbah medis menggunakan kantong khusus dan troli tertutup, serta mengolah limbah cair melalui IPAL sebelum dibuang ke lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan berbagai upaya preventif untuk meminimalkan pencemaran lingkungan.

Aktivitas Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah di RSUD Konawe dilakukan mulai dari tahap pemilahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, hingga pemusnahan limbah oleh pihak ketiga. Selain itu, rumah sakit melakukan pencatatan volume limbah melalui logbook dan pelaporan kepada instansi terkait. Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui IPAL disertai pengujian kualitas air sebelum dibuang ke lingkungan.

Aktivitas Moneter

Identifikasi Biaya Lingkungan

Identifikasi biaya lingkungan di RSUD Konawe dilakukan melalui mekanisme penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Biaya lingkungan belum dicatat sebagai akun tersendiri, melainkan diidentifikasi berdasarkan unit pengusul dan jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

"Kalau di anggaran biasanya tertulis item kegiatannya, misalnya biaya pemusnahan limbah. Jadi dari situ sudah bisa diketahui bahwa itu termasuk biaya lingkungan, walaupun tidak secara khusus diberi label biaya lingkungan." (I2, Pegawai Subbagian Keuangan, wawancara, 27 Januari 2026).

Komponen biaya meliputi biaya pengelolaan limbah domestik, limbah medis, penggunaan APD, pelatihan, serta pembayaran jasa pihak ketiga. Evaluasi biaya dilakukan dengan membandingkan anggaran dan realisasi pembayaran.

Klasifikasi Biaya Lingkungan

Klasifikasi biaya lingkungan belum dilakukan secara khusus berdasarkan konsep *Green Accounting*. Biaya lingkungan masih digabung dalam kelompok belanja umum seperti belanja pegawai, belanja bahan habis pakai, dan belanja jasa lainnya. Berdasarkan analisis peneliti, biaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi biaya pencegahan, biaya deteksi, dan biaya kegagalan internal sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Biaya Lingkungan Berdasarkan Aktivitas

No	Klasifikasi Biaya Lingkungan	Nama Aktivitas	Nama Akun	Kode Akun
1.	Biaya Pencegahan	Jasa petugas pengelolaan limbah	Belanja Pegawai	**5.1**
		Kantong sampah dan APD petugas	Belanja Bahan Habis Pakai	**5.2.2**
2.	Biaya Kegagalan Eksteral	Jasa pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga	Belanja Jasa Lainnya	**5.2.3**
		Jasa pemusnahan limbah medis oleh vendor	Belanja Jasa Lainnya	**5.2.3**
3.	Biaya Deteksi	Pengujian Kualitas Air Limbah IPAL	Belanja Jasa Lainnya	**5.2.3**

Sumber: RSUD Konawe, 2026.

Dalam penelitian ini, jasa pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 oleh pihak ketiga dikategorikan sebagai biaya kegagalan eksternal karena biaya tersebut timbul setelah limbah dihasilkan dan memerlukan penanganan oleh pihak eksternal sebelum atau dalam proses pengelolaan lebih lanjut. Sementara itu, pengujian kualitas air limbah IPAL dikategorikan sebagai biaya deteksi karena aktivitas tersebut bertujuan mengidentifikasi dan memastikan tingkat kepatuhan kualitas limbah sebelum dilepaskan ke lingkungan.

Pengungkapan Biaya Lingkungan

Pengungkapan biaya lingkungan di RSUD Konawe belum dilakukan secara khusus dalam laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

"Terkait biaya lingkungan sebenarnya tidak ada spesifik muncul bahwa biaya lingkungan. Jadi kalau dalam laporan keuangan itu masuk dalam satu kode rekening semuanya." (I1, Kepala Subbagian Keuangan, wawancara, 27 Januari 2026).

Informasi biaya lingkungan masih tergabung dalam akun belanja umum sehingga hanya dapat diidentifikasi melalui penelusuran dokumen internal. Dengan demikian, pengungkapan biaya lingkungan masih bersifat implisit.

Pembahasan

Aktivitas Fisik Lingkungan dalam Perspektif *Green Accounting*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik lingkungan di RSUD Konawe telah dilaksanakan secara sistematis sebagai bagian dari operasional organisasi. Namun demikian, aktivitas tersebut masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemenuhan kewajiban regulatif, sehingga belum diarahkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan biaya lingkungan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas fisik lingkungan dipandang sebagai fungsi operasional yang harus dilaksanakan agar organisasi memenuhi standar yang ditetapkan, bukan sebagai sumber informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial. Akibatnya, keterkaitan antara aktivitas lingkungan dengan informasi biaya belum terbentuk secara optimal.

Dalam perspektif *Green Accounting*, aktivitas fisik merupakan fondasi utama dalam pengelolaan lingkungan organisasi karena setiap aktivitas pencegahan, pengendalian, maupun penanganan dampak lingkungan akan menghasilkan konsekuensi ekonomi yang perlu diidentifikasi dan dikelola. Oleh karena itu, implementasi *Green Accounting* tidak hanya menekankan pelaksanaan aktivitas lingkungan, tetapi juga bagaimana aktivitas tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi sehingga biaya yang timbul dapat diukur, dianalisis, dan dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kinerja lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa RSUD Konawe telah memenuhi aspek substantif *Green Accounting* melalui pelaksanaan aktivitas lingkungan, namun belum mengintegrasikan aktivitas tersebut dengan sistem akuntansi lingkungan secara formal. Dengan demikian, aktivitas fisik masih berfungsi sebagai kegiatan operasional, sementara fungsi manajerial *Green Accounting* belum berjalan secara optimal.

Jika dianalisis menggunakan *Institutional Theory*, temuan ini menunjukkan bahwa tekanan koersif (*coercive isomorphism*) merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi pelaksanaan aktivitas lingkungan di RSUD Konawe. Organisasi melaksanakan berbagai aktivitas lingkungan terutama sebagai respons terhadap tuntutan regulasi pemerintah dan persyaratan operasional yang harus dipenuhi untuk mempertahankan legitimasi organisasi. Sebaliknya, tekanan normatif (*normative isomorphism*) belum berkembang secara optimal karena belum terdapat kebijakan internal yang mengintegrasikan aktivitas lingkungan dengan sistem akuntansi maupun pengelolaan biaya lingkungan. Demikian pula tekanan mimetik (*mimetic isomorphism*) belum terlihat secara nyata karena belum terdapat upaya benchmarking atau adopsi praktik *Green Accounting* dari organisasi lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *Green Accounting* di RSUD Konawe masih bersifat *compliance-based* dibandingkan *strategy-based*, sehingga orientasi organisasi lebih menekankan kepatuhan terhadap regulasi daripada pemanfaatan informasi lingkungan sebagai instrumen peningkatan kinerja organisasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ghifari & Rosidi (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan *Green Accounting* pada organisasi sektor publik umumnya masih didominasi oleh kepatuhan terhadap regulasi sehingga aktivitas lingkungan belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Dengah et al. (2024) yang menemukan bahwa aktivitas pengelolaan lingkungan telah berjalan sesuai ketentuan, tetapi informasi yang dihasilkan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengelolaan biaya lingkungan. Namun demikian, temuan penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa organisasi telah menjadikan aktivitas lingkungan sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan strategis melalui integrasi informasi fisik dan moneter. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh tingkat kematangan sistem akuntansi lingkungan, dukungan kebijakan internal, serta komitmen manajemen dalam mengembangkan *Green Accounting* sebagai bagian dari strategi organisasi.

Dari perspektif manajerial, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas aktivitas

lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menghubungkan aktivitas tersebut dengan informasi biaya. Integrasi aktivitas fisik dengan sistem akuntansi lingkungan akan menghasilkan informasi yang lebih akurat mengenai besarnya sumber daya yang digunakan untuk setiap aktivitas lingkungan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai dasar evaluasi efisiensi, penyusunan anggaran, pengendalian biaya, serta perencanaan kebijakan lingkungan yang lebih efektif. Dengan demikian, aktivitas lingkungan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban operasional semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik lingkungan di RSUD Konawe telah menunjukkan komitmen organisasi dalam menjalankan pengelolaan lingkungan secara sistematis. Namun, implementasinya masih berorientasi pada kepatuhan operasional sehingga belum sepenuhnya mendukung penerapan *Green Accounting* secara strategis. Penguatan integrasi antara aktivitas fisik dan sistem informasi akuntansi menjadi langkah penting agar aktivitas lingkungan mampu memberikan nilai tambah bagi pengambilan keputusan manajerial dan peningkatan akuntabilitas organisasi.

Aktivitas Moneter Lingkungan dalam Perspektif *Green Accounting*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Konawe telah mengalokasikan dan merealisasikan biaya yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan sebagai bagian dari operasional organisasi. Namun, biaya tersebut belum diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diungkapkan secara khusus sebagai biaya lingkungan dalam sistem pelaporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi telah mengakui keberadaan biaya lingkungan secara ekonomi, tetapi belum mengelolanya sebagai informasi akuntansi yang memiliki nilai strategis. Akibatnya, informasi mengenai biaya lingkungan masih tersebar pada berbagai akun belanja sehingga belum mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai besarnya sumber daya yang digunakan untuk mendukung pengelolaan lingkungan.

Dalam perspektif *Green Accounting*, aktivitas moneter tidak hanya berkaitan dengan pengeluaran dana untuk kegiatan lingkungan, tetapi juga mencakup proses identifikasi, klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan biaya lingkungan secara sistematis. Informasi tersebut memiliki fungsi internal sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial serta fungsi eksternal sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara optimal di RSUD Konawe karena biaya lingkungan masih dicatat berdasarkan struktur akun belanja umum, bukan berdasarkan klasifikasi biaya lingkungan seperti biaya pencegahan, biaya deteksi, maupun biaya kegagalan lingkungan. Akibatnya, manajemen mengalami keterbatasan dalam mengevaluasi efisiensi biaya lingkungan, mengukur kinerja pengelolaan lingkungan, maupun menyusun kebijakan pengendalian biaya secara lebih efektif.

Apabila dianalisis menggunakan *Institutional Theory*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan koersif (*coercive isomorphism*) masih menjadi faktor dominan dalam pengelolaan biaya lingkungan. Pengalokasian biaya dilakukan terutama sebagai respons terhadap tuntutan regulasi dan kewajiban operasional organisasi sehingga biaya lingkungan dipandang sebagai konsekuensi yang harus dipenuhi agar organisasi tetap memperoleh legitimasi. Sebaliknya, tekanan normatif (*normative isomorphism*) belum berkembang secara optimal karena belum terdapat kebijakan internal maupun standar operasional yang secara khusus mengatur identifikasi, klasifikasi, dan pengungkapan biaya lingkungan. Tekanan mimetik (*mimetic isomorphism*) juga belum terlihat karena organisasi belum melakukan benchmarking ataupun mengadopsi praktik pelaporan biaya lingkungan dari organisasi lain yang telah menerapkan *Green Accounting* secara lebih komprehensif. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan *Green Accounting* di RSUD Konawe masih bersifat *compliance-based*, yaitu berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, dan belum berkembang menjadi *strategy-based* yang memanfaatkan informasi biaya lingkungan sebagai bagian dari strategi organisasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ghifari & Rosidi (2018) yang menunjukkan bahwa biaya lingkungan pada organisasi sektor publik umumnya telah dikeluarkan, tetapi belum dikelola sebagai informasi akuntansi yang terstruktur. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Dengah

et al. (2024) yang menyatakan bahwa praktik *Green Accounting* masih terbatas pada aspek operasional sehingga informasi biaya lingkungan belum disajikan secara terpisah dalam sistem pelaporan keuangan. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa organisasi telah mengembangkan klasifikasi biaya lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi manajemen sehingga informasi biaya dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi efisiensi, mengendalikan penggunaan sumber daya, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat implementasi *Green Accounting* dipengaruhi oleh komitmen manajemen, dukungan kebijakan internal, serta tingkat kematangan sistem akuntansi yang dimiliki organisasi.

Dari perspektif manajerial, kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem informasi biaya lingkungan menjadi kebutuhan penting bagi organisasi. Penyusunan akun khusus biaya lingkungan serta klasifikasi biaya berdasarkan aktivitas lingkungan akan menghasilkan informasi yang lebih akurat mengenai besarnya biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari setiap aktivitas tersebut. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk meningkatkan efektivitas penyusunan anggaran, melakukan pengendalian biaya, mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, biaya lingkungan tidak lagi dipandang sebagai sekadar beban operasional, tetapi sebagai informasi strategis yang mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas moneter lingkungan di RSUD Konawe telah menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam mengalokasikan sumber daya untuk mendukung pengelolaan lingkungan. Namun, implementasi *Green Accounting* masih bersifat parsial karena biaya lingkungan belum diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diungkapkan secara sistematis dalam sistem akuntansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan biaya lingkungan masih berorientasi pada kepatuhan administratif (*compliance-driven*) dan belum sepenuhnya berkembang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial.

Penerapan Biaya Lingkungan Berdasarkan Kerangka EMA-PPOPET

Penerapan biaya lingkungan di RSUD Konawe dalam kerangka *Environmental Management Accounting* (EMA-PPOPET) menunjukkan bahwa seluruh tahapan telah dilakukan, namun masih bersifat operasional dan belum terintegrasi secara sistematis dalam sistem akuntansi.

***Planning* (Perencanaan)**

Perencanaan biaya lingkungan di RSUD Konawe menunjukkan bahwa organisasi telah mengidentifikasi berbagai aktivitas yang memerlukan alokasi sumber daya, seperti pengelolaan limbah, penyediaan sarana pendukung, serta kerja sama dengan pihak ketiga. Temuan ini mengindikasikan bahwa biaya lingkungan telah dipertimbangkan sejak tahap perencanaan, meskipun orientasinya masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional dibandingkan sebagai instrumen pengendalian biaya lingkungan. Dengan kata lain, perencanaan telah mampu memastikan tersedianya sumber daya untuk mendukung pengelolaan lingkungan, tetapi belum dimanfaatkan sebagai dasar untuk meningkatkan efisiensi maupun mengevaluasi kinerja lingkungan organisasi.

Dalam perspektif *Environmental Management Accounting* (EMA), tahap *planning* seharusnya tidak hanya mengidentifikasi aktivitas yang memerlukan biaya, tetapi juga menghubungkan biaya tersebut dengan tujuan peningkatan efisiensi, pengurangan dampak lingkungan, dan pengambilan keputusan manajerial. Pada RSUD Konawe, perencanaan biaya masih disusun berdasarkan kebutuhan operasional tahunan sehingga fungsi strategis EMA sebagai alat perencanaan biaya lingkungan belum sepenuhnya terwujud.

Jika dianalisis menggunakan *Institutional Theory,* kondisi tersebut menunjukkan dominasi tekanan koersif (*coercive isomorphism*). Perencanaan biaya lingkungan dilakukan terutama sebagai respons terhadap kewajiban regulasi dan kebutuhan operasional organisasi agar aktivitas pengelolaan lingkungan tetap berjalan. Sebaliknya, tekanan normatif belum berkembang secara optimal karena belum terdapat pedoman internal yang secara khusus mengarahkan perencanaan biaya lingkungan berdasarkan konsep *Green Accounting*. Selain itu, tekanan mimetik juga belum terlihat karena organisasi belum mengadopsi praktik perencanaan biaya lingkungan dari institusi lain

yang telah menerapkan EMA secara lebih komprehensif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa organisasi sektor publik umumnya telah memasukkan aktivitas lingkungan ke dalam proses perencanaan anggaran, tetapi biaya lingkungan masih dipandang sebagai biaya operasional sehingga belum dimanfaatkan sebagai informasi strategis dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD Konawe telah memiliki fondasi awal untuk mengembangkan perencanaan biaya lingkungan karena seluruh aktivitas lingkungan telah diidentifikasi dalam dokumen perencanaan, meskipun belum diklasifikasikan sebagai biaya lingkungan secara eksplisit.

Dari sisi manajerial, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan mekanisme perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan anggaran, tetapi juga mengaitkan setiap aktivitas lingkungan dengan informasi biaya yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi efisiensi dan penyusunan kebijakan lingkungan di masa mendatang.

Dengan demikian, tahap *planning* telah dilaksanakan, tetapi implementasinya masih bersifat operasional dan *compliance-based,* sehingga belum sepenuhnya mencerminkan fungsi strategis *Environmental Management Accounting* dalam pengelolaan biaya lingkungan.

Budgeting (Penganggaran)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Konawe telah mengalokasikan biaya yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Namun, biaya tersebut belum disusun dalam pos anggaran yang secara khusus merepresentasikan biaya lingkungan, melainkan masih digabungkan ke dalam kelompok belanja umum seperti belanja pegawai, belanja bahan habis pakai, dan belanja jasa lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rumah sakit telah mengakui kebutuhan pendanaan untuk mendukung aktivitas lingkungan, tetapi penganggarannya masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional, bukan sebagai bagian dari sistem pengelolaan biaya lingkungan yang terstruktur. Dengan demikian, fungsi penganggaran masih bersifat administratif dan belum menghasilkan informasi biaya lingkungan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi maupun efektivitas pengelolaan lingkungan.

Dalam perspektif *Green Accounting*, penganggaran biaya lingkungan seharusnya tidak hanya menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan aktivitas lingkungan, tetapi juga menghasilkan informasi biaya yang teridentifikasi dan terklasifikasi secara jelas. Pengelompokan biaya berdasarkan jenis aktivitas lingkungan, seperti biaya pencegahan, biaya deteksi, maupun biaya kegagalan lingkungan, memungkinkan organisasi melakukan pengendalian biaya secara lebih efektif dan menjadikan informasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena struktur anggaran masih mengikuti klasifikasi belanja konvensional sehingga biaya lingkungan belum dapat diidentifikasi secara langsung.

Apabila dianalisis menggunakan Institutional Theory, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penganggaran masih didominasi oleh tekanan koersif (*coercive isomorphism*). Pengalokasian anggaran dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban organisasi dalam mendukung aktivitas pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, tekanan normatif (*normative isomorphism*) belum berkembang secara optimal karena belum terdapat kebijakan internal yang mengatur penganggaran biaya lingkungan berdasarkan prinsip *Green Accounting*. Selain itu, tekanan mimetik (*mimetic isomorphism*) juga belum terlihat karena organisasi belum mengadopsi praktik penganggaran biaya lingkungan yang telah diterapkan oleh institusi lain secara lebih sistematis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem penganggaran masih didorong oleh tuntutan kepatuhan dibandingkan oleh inisiatif organisasi untuk meningkatkan kualitas informasi biaya lingkungan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa banyak organisasi sektor publik telah mengalokasikan anggaran untuk aktivitas lingkungan, tetapi belum mengembangkan mekanisme penganggaran yang secara khusus mengidentifikasi biaya lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi lingkungan. Akibatnya, informasi biaya lingkungan masih tersebar dalam berbagai akun belanja sehingga sulit digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja lingkungan maupun efisiensi biaya. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa

keberadaan anggaran lingkungan dalam RBA merupakan modal awal yang penting untuk mengembangkan sistem penganggaran berbasis *Green Accounting* tanpa harus mengubah mekanisme penganggaran yang telah berjalan.

Dari perspektif manajerial, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem penganggaran melalui penyusunan klasifikasi biaya lingkungan yang lebih spesifik dalam dokumen anggaran. Langkah tersebut tidak hanya mempermudah proses identifikasi dan pengendalian biaya lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam penyusunan anggaran, evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Dengan adanya klasifikasi biaya yang lebih jelas, organisasi akan lebih mudah menilai efisiensi penggunaan sumber daya dan menentukan prioritas program lingkungan pada periode berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap budgeting di RSUD Konawe telah mendukung keberlangsungan aktivitas lingkungan melalui penyediaan anggaran, tetapi implementasinya masih berorientasi pada *administrative budgeting* dan *compliance-based budgeting*. Oleh karena itu, penguatan klasifikasi biaya lingkungan dalam sistem penganggaran menjadi langkah penting untuk mendorong penerapan *Green Accounting* yang lebih strategis dan menghasilkan informasi biaya yang lebih relevan bagi pengambilan keputusan manajerial.

***Implementation* (Implementasi)-*Operation* (Operasional)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi biaya lingkungan di RSUD Konawe telah berjalan sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku. Aktivitas pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasarkan anggaran yang telah disetujui, sedangkan proses pencatatan biaya dilakukan setelah seluruh dokumen pendukung memenuhi persyaratan administrasi. Selain itu, pelaksanaan aktivitas lingkungan juga didukung oleh berbagai dokumen operasional, seperti logbook pengelolaan limbah, manifes limbah, dan laporan monitoring lingkungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memiliki mekanisme operasional yang mampu menjamin pelaksanaan aktivitas lingkungan berjalan secara konsisten dan akuntabel. Namun demikian, informasi mengenai aktivitas fisik lingkungan dan informasi biaya masih dikelola dalam sistem yang berbeda sehingga belum menghasilkan informasi biaya lingkungan yang terintegrasi.

Dalam perspektif *Green Accounting*, implementasi tidak hanya diukur dari terlaksananya aktivitas lingkungan, tetapi juga dari kemampuan organisasi menghubungkan aktivitas tersebut dengan informasi biaya yang relevan. Integrasi antara data fisik dan data moneter merupakan karakteristik utama *Environmental Management Accounting* karena memungkinkan organisasi mengetahui besarnya sumber daya yang digunakan dalam setiap aktivitas lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Konawe telah melaksanakan kedua aspek tersebut, namun hubungan antara keduanya belum terbentuk secara sistematis. Aktivitas lingkungan telah terdokumentasi dengan baik melalui berbagai laporan operasional, sedangkan biaya yang timbul masih dicatat dalam akun belanja umum. Kondisi tersebut menyebabkan informasi biaya lingkungan belum dapat ditelusuri secara langsung berdasarkan aktivitas yang menimbulkannya.

Jika dianalisis menggunakan Institutional Theory, implementasi dan operasional biaya lingkungan masih memperlihatkan dominasi tekanan koersif (*coercive isomorphism*). Organisasi menjalankan berbagai aktivitas lingkungan dan prosedur administrasi terutama untuk memenuhi tuntutan regulasi serta menjaga legitimasi operasional. Sementara itu, tekanan normatif (*normative isomorphism*) mulai terlihat melalui adanya pembagian tugas antarunit, prosedur administrasi keuangan, dan mekanisme dokumentasi yang telah berjalan secara konsisten. Namun, tekanan normatif tersebut belum berkembang hingga menghasilkan kebijakan akuntansi yang secara khusus mengintegrasikan aktivitas lingkungan dengan sistem pencatatan biaya. Di sisi lain, tekanan mimetik (*mimetic isomorphism*) juga belum tampak karena organisasi belum mengadopsi praktik pencatatan biaya lingkungan berbasis aktivitas (*activity-based environmental costing*) sebagaimana diterapkan pada organisasi yang telah mengimplementasikan *Green Accounting* secara lebih matang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa organisasi sektor publik umumnya telah memiliki mekanisme operasional pengelolaan lingkungan yang memadai, tetapi masih menghadapi kendala

dalam mengintegrasikan informasi aktivitas lingkungan dengan sistem akuntansi. Akibatnya, informasi fisik lingkungan dan informasi moneter berkembang secara terpisah sehingga manfaat *Environmental Management Accounting* sebagai alat pengendalian biaya belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan sistem dokumentasi operasional yang relatif lengkap merupakan modal penting bagi organisasi untuk membangun sistem informasi biaya lingkungan yang lebih terintegrasi.

Dari perspektif manajerial, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan sistem informasi yang mampu menghubungkan setiap aktivitas lingkungan dengan biaya yang ditimbulkannya. Integrasi antara data operasional dan data keuangan akan memudahkan organisasi dalam melakukan penelusuran biaya, mengevaluasi efisiensi setiap aktivitas lingkungan, serta menghasilkan informasi yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain meningkatkan transparansi, integrasi tersebut juga dapat membantu manajemen dalam menyusun strategi pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berbasis data.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap *implementation–operation* di RSUD Konawe telah menunjukkan pelaksanaan aktivitas lingkungan dan pencatatan biaya yang berjalan secara administratif dan akuntabel. Namun, implementasi tersebut masih bersifat operational compliance karena belum mampu mengintegrasikan informasi aktivitas fisik dan informasi moneter ke dalam satu sistem akuntansi lingkungan. Oleh karena itu, penguatan integrasi antara sistem operasional dan sistem akuntansi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan *Environmental Management Accounting* dan mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih strategis.

Evaluation (Evaluasi)

Tahap evaluation dalam kerangka *Environmental Management Accounting* (EMA) bertujuan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi biaya lingkungan sehingga organisasi dapat mengidentifikasi tingkat efisiensi maupun efektivitas pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi biaya lingkungan di RSUD Konawe telah dilakukan melalui perbandingan antara anggaran dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan realisasi pengeluaran. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap aktivitas operasional melalui monitoring kegiatan pengelolaan limbah dan pencatatan pada logbook. Namun, kedua bentuk evaluasi tersebut masih berjalan secara terpisah sehingga belum menghasilkan informasi yang mampu menggambarkan hubungan antara kinerja lingkungan dan penggunaan biaya.

Temuan ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan RSUD Konawe masih berorientasi pada kepatuhan administratif (administrative compliance), yaitu memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi anggaran dan seluruh aktivitas telah dilaksanakan sesuai prosedur. Evaluasi belum diarahkan pada analisis apakah biaya yang dikeluarkan telah memberikan manfaat lingkungan yang optimal atau apakah terdapat peluang peningkatan efisiensi melalui pengelolaan biaya lingkungan. Akibatnya, informasi evaluasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam perspektif *Green Accounting*, evaluasi seharusnya tidak hanya menilai kesesuaian antara anggaran dan realisasi, tetapi juga menghubungkan informasi biaya dengan kinerja lingkungan yang dihasilkan. Integrasi tersebut memungkinkan organisasi menilai efektivitas setiap aktivitas lingkungan, mengidentifikasi sumber pemborosan, serta menyusun strategi pengelolaan biaya yang lebih efisien. Pada RSUD Konawe, belum adanya klasifikasi biaya lingkungan dan belum terintegrasinya data aktivitas fisik dengan informasi moneter menyebabkan fungsi evaluatif *Green Accounting* belum berjalan secara optimal.

Apabila dianalisis menggunakan Institutional Theory, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan koersif masih menjadi faktor dominan dalam pelaksanaan evaluasi. Evaluasi dilakukan terutama untuk memenuhi ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran yang diwajibkan oleh sistem pengelolaan keuangan. Sementara itu, tekanan normatif belum berkembang secara optimal karena belum terdapat pedoman internal yang mengarahkan evaluasi biaya lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi lingkungan. Di sisi lain, tekanan mimetik juga belum terlihat karena rumah sakit belum mengadopsi praktik evaluasi lingkungan yang mengintegrasikan indikator biaya dan kinerja sebagaimana diterapkan oleh organisasi yang

telah mengimplementasikan *Green Accounting* secara lebih komprehensif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa banyak organisasi telah melaksanakan evaluasi lingkungan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal, tetapi evaluasi tersebut masih berfokus pada aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik bahwa keterbatasan evaluasi tidak hanya disebabkan oleh belum adanya akun biaya lingkungan, tetapi juga oleh belum terintegrasinya informasi aktivitas lingkungan dengan sistem evaluasi biaya. Kondisi tersebut menyebabkan informasi evaluasi belum mampu mendukung pengambilan keputusan manajerial secara optimal.

Dari sisi implikasi manajerial, rumah sakit perlu mengembangkan mekanisme evaluasi yang mengintegrasikan indikator fisik dan indikator moneter lingkungan. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap besarnya realisasi anggaran, tetapi juga terhadap efisiensi biaya setiap aktivitas lingkungan, sehingga manajemen dapat mengetahui aktivitas yang memberikan manfaat lingkungan terbesar dengan penggunaan biaya yang paling efektif. Integrasi tersebut akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi lingkungan sekaligus memperkuat fungsi *Green Accounting* sebagai instrumen pengendalian dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap evaluation dalam penerapan *Green Accounting* di RSUD Konawe telah berjalan sebagai mekanisme pengendalian administratif, namun belum berkembang menjadi evaluasi strategis yang mengintegrasikan informasi biaya dan kinerja lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *Green Accounting* masih berada pada tahap *compliance-based environmental management*, sehingga diperlukan penguatan sistem evaluasi agar mampu menghasilkan informasi yang lebih relevan bagi pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja lingkungan organisasi.

Follow-up (Tindak Lanjut)

Tahap follow-up dalam kerangka *Environmental Management Accounting* (EMA) bertujuan memastikan bahwa hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan maupun pengelolaan biaya lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, tindak lanjut di RSUD Konawe telah dilakukan terhadap permasalahan operasional yang muncul selama pelaksanaan kegiatan lingkungan, seperti perbaikan fasilitas pendukung, penggantian peralatan yang mengalami kerusakan, serta pengajuan kebutuhan sarana melalui mekanisme perencanaan berikutnya. Namun demikian, tindak lanjut tersebut masih berfokus pada penyelesaian kendala operasional dan belum diarahkan pada penyempurnaan sistem pengelolaan biaya lingkungan.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses tindak lanjut di RSUD Konawe masih bersifat reaktif, yaitu dilakukan ketika ditemukan kendala teknis atau kebutuhan operasional, bukan sebagai bagian dari siklus perbaikan sistem akuntansi lingkungan. Selama realisasi biaya masih sesuai dengan anggaran dan ketentuan kerja sama dengan pihak ketiga, tidak terdapat evaluasi lanjutan mengenai efektivitas penggunaan biaya maupun peluang peningkatan efisiensi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hasil evaluasi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengembangan kebijakan pengelolaan biaya lingkungan.

Dalam perspektif *Green Accounting*, tindak lanjut merupakan tahapan penting karena informasi biaya lingkungan seharusnya menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, penyusunan anggaran berikutnya, serta peningkatan efisiensi pengelolaan lingkungan. *Green Accounting* tidak berhenti pada pencatatan dan pelaporan biaya, tetapi juga menekankan penggunaan informasi tersebut untuk mendukung continuous improvement dalam pengambilan keputusan manajerial. Pada RSUD Konawe, fungsi tersebut belum berjalan secara optimal karena informasi biaya lingkungan belum diidentifikasi dan dievaluasi secara khusus sehingga belum mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi manajemen.

Jika dianalisis menggunakan Institutional Theory, kondisi tersebut kembali menunjukkan dominasi tekanan koersif (*coercive isomorphism*). Tindak lanjut lebih banyak dilakukan untuk menjaga keberlangsungan operasional dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Sementara itu, tekanan normatif belum berkembang secara optimal karena belum terdapat kebijakan internal yang mengatur mekanisme perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengelolaan biaya lingkungan. Di sisi lain, tekanan mimetik juga belum terlihat karena rumah sakit belum mengadopsi praktik organisasi lain yang telah memanfaatkan hasil

evaluasi biaya lingkungan sebagai dasar penyempurnaan sistem akuntansi lingkungan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa tindak lanjut dalam pengelolaan lingkungan pada banyak organisasi masih berorientasi pada penyelesaian masalah operasional dan pemenuhan kewajiban administratif. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi RSUD Konawe bukan hanya pada aspek operasional, melainkan juga belum terbangunnya mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) yang menghubungkan hasil evaluasi dengan penyempurnaan sistem *Green Accounting*. Akibatnya, proses pembelajaran organisasi dalam pengelolaan biaya lingkungan belum berkembang secara optimal.

Dari sisi implikasi manajerial, rumah sakit perlu mengembangkan mekanisme tindak lanjut yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan fasilitas atau penyelesaian kendala operasional, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan biaya lingkungan. Hasil evaluasi sebaiknya digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan klasifikasi biaya lingkungan, memperbaiki sistem pelaporan, menyusun standar operasional pengelolaan biaya lingkungan, serta meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Dengan demikian, proses tindak lanjut dapat menjadi bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan yang mendukung implementasi *Green Accounting* secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap follow-up dalam penerapan *Green Accounting* di RSUD Konawe masih berfokus pada perbaikan operasional dan kepatuhan administratif, sedangkan tindak lanjut terhadap sistem pengelolaan biaya lingkungan belum dilakukan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *Green Accounting* masih berada pada tahap *compliance-based*, sehingga diperlukan mekanisme umpan balik yang lebih terstruktur agar informasi biaya lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja lingkungan dan pengambilan keputusan manajerial.

Keterbatasan Implementasi *Green Accounting* Berdasarkan Kerangka EMA-PPOPET

Analisis terhadap seluruh tahapan *Environmental Management Accounting* (EMA-PPOPET) menunjukkan bahwa implementasi *Green Accounting* di RSUD Konawe telah berjalan pada aspek operasional, tetapi belum berkembang menjadi suatu sistem pengelolaan biaya lingkungan yang terintegrasi. Seluruh tahapan, mulai dari planning, budgeting, implementation–operation, evaluation, hingga follow-up, pada dasarnya telah dilaksanakan dalam aktivitas organisasi. Namun, pelaksanaan setiap tahapan masih berlangsung secara parsial sehingga hubungan antarproses belum membentuk suatu siklus pengelolaan biaya lingkungan yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kendala utama implementasi *Green Accounting* di RSUD Konawe bukan terletak pada ketiadaan aktivitas lingkungan maupun biaya lingkungan, melainkan pada belum terintegrasinya informasi lingkungan ke dalam sistem akuntansi organisasi. Aktivitas pengelolaan lingkungan telah menghasilkan berbagai konsekuensi ekonomi berupa biaya operasional, tetapi informasi tersebut masih tersebar dalam berbagai akun belanja umum dan belum diklasifikasikan sebagai informasi biaya lingkungan. Akibatnya, data biaya yang tersedia belum mampu memberikan gambaran mengenai besarnya investasi organisasi dalam pengelolaan lingkungan maupun efektivitas penggunaan biaya tersebut.

Dalam perspektif *Green Accounting*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi akuntansi lingkungan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pengambilan keputusan manajerial. *Green Accounting* tidak hanya bertujuan mencatat pengeluaran yang berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menghasilkan informasi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi biaya, mengevaluasi kinerja lingkungan, serta memperkuat akuntabilitas organisasi kepada para pemangku kepentingan. Ketika biaya lingkungan belum diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diungkapkan secara sistematis, maka manfaat informasi tersebut bagi proses perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi menjadi terbatas.

Apabila dianalisis menggunakan Institutional Theory, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Green Accounting* di RSUD Konawe masih didominasi oleh tekanan koersif (*coercive isomorphism*). Praktik pengelolaan lingkungan dan pengeluaran biaya lebih banyak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi eksternal daripada sebagai bagian dari strategi organisasi dalam

meningkatkan kinerja lingkungan. Tekanan normatif (*normative isomorphism*) juga belum berkembang secara optimal, yang ditunjukkan oleh belum adanya kebijakan internal maupun standar operasional yang secara khusus mengatur pengelolaan biaya lingkungan. Sementara itu, tekanan mimetik (*mimetic isomorphism*) belum terlihat karena organisasi belum melakukan pembelajaran atau benchmarking terhadap praktik *Green Accounting* yang telah diterapkan oleh organisasi lain. Dominasi tekanan koersif tersebut menyebabkan implementasi *Green Accounting* masih berada pada tahap compliance-based environmental management, belum berkembang menuju strategic environmental management.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi *Green Accounting* pada organisasi sektor publik umumnya masih menghadapi kendala berupa belum adanya klasifikasi biaya lingkungan, keterbatasan sistem pelaporan, serta belum optimalnya pemanfaatan informasi biaya lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dengan menunjukkan bahwa keterbatasan implementasi tidak hanya terjadi pada aspek pencatatan biaya, tetapi juga pada belum terhubungnya seluruh tahapan EMA-PPOPET menjadi satu siklus manajemen yang utuh. Temuan tersebut memperjelas kontribusi penelitian ini bahwa integrasi *Green Accounting* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dan pencatatan biaya lingkungan, tetapi juga dengan keterhubungan aktivitas fisik lingkungan, informasi moneter, serta tahapan manajerial dalam kerangka EMA-PPOPET. Dalam konteks RSUD Konawe, aktivitas fisik pengelolaan lingkungan telah berjalan, tetapi informasi biaya yang dihasilkan dari aktivitas tersebut belum terintegrasi secara khusus ke dalam sistem akuntansi dan belum sepenuhnya digunakan sebagai informasi untuk evaluasi manajerial. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan *Green Accounting* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan biaya lingkungan, tetapi juga oleh tingkat integrasi antara aktivitas lingkungan, sistem akuntansi, dan proses manajerial.

Dari sisi implikasi manajerial, RSUD Konawe perlu memperkuat implementasi *Green Accounting* melalui penyusunan kebijakan internal mengenai pengelolaan biaya lingkungan, pengembangan klasifikasi akun biaya lingkungan, integrasi informasi aktivitas fisik dengan data moneter, serta penyempurnaan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut. Langkah tersebut akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi lingkungan sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, pengendalian biaya, dan peningkatan efisiensi organisasi. Selain itu, penerapan benchmarking terhadap organisasi yang telah mengimplementasikan *Green Accounting* secara lebih komprehensif dapat menjadi alternatif untuk mempercepat proses pengembangan sistem akuntansi lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi *Green Accounting* di RSUD Konawe telah memenuhi aspek dasar pengelolaan lingkungan dan pengelolaan biaya lingkungan, tetapi integrasi antar tahapan dalam kerangka EMA-PPOPET masih belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *Green Accounting* masih berada pada tahap parsial dan berorientasi pada kepatuhan (compliance-based). Oleh karena itu, penguatan pada aspek klasifikasi biaya, integrasi sistem informasi, evaluasi, serta mekanisme perbaikan berkelanjutan menjadi langkah penting agar *Green Accounting* dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung efektivitas pengelolaan lingkungan dan pengambilan keputusan manajerial.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta analisis menggunakan kerangka EMA-PPOPET, Pengelolaan biaya lingkungan di RSUD Konawe telah menjadi bagian dari proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi keuangan rumah sakit, tetapi belum terintegrasi secara khusus dalam sistem akuntansi lingkungan. Biaya pengelolaan limbah telah diakomodasi dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta direalisasikan melalui mekanisme keuangan rumah sakit. Namun, biaya tersebut masih mengikuti struktur akun belanja umum dan belum diidentifikasi serta diklasifikasikan secara khusus berdasarkan kategori biaya lingkungan. Pengungkapan biaya lingkungan juga belum disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengelolaan lingkungan secara operasional dan integrasi informasi biaya lingkungan dalam sistem akuntansi. Aktivitas fisik pengelolaan

limbah telah berjalan relatif baik, sedangkan aktivitas moneter masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menghasilkan informasi biaya lingkungan yang terintegrasi untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial. Dalam perspektif EMA-PPOPET, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan pada aspek fisik telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengoperasian, evaluasi, dan tindak lanjut, tetapi keterhubungan antara informasi aktivitas fisik dan informasi moneter belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem akuntansi rumah sakit. Dari perspektif Institutional Theory, implementasi pengelolaan lingkungan di RSUD Konawe terutama dipengaruhi oleh tekanan koersif berupa regulasi dan tuntutan kepatuhan, sementara tekanan normatif dan mimetik belum terlihat secara kuat dalam pembentukan praktik akuntansi lingkungan. Saran untuk penelitian 1). Pertama, RSUD Konawe disarankan untuk mulai mengembangkan klasifikasi biaya lingkungan yang lebih rinci, khususnya dengan mengadopsi konsep biaya lingkungan dalam *Green Accounting*. Pemisahan biaya pencegahan, deteksi, dan kegagalan lingkungan diharapkan dapat membantu manajemen dalam memahami struktur biaya secara lebih jelas dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. 2).Rumah sakit perlu mempertimbangkan peningkatan pengungkapan biaya lingkungan, baik melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) maupun laporan internal manajemen. Pengungkapan yang lebih informatif akan meningkatkan transparansi serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan lingkungan rumah sakit. 3). Dalam rangka memperkuat penerapan *Environmental Management Accounting* (EMA), RSUD Konawe disarankan untuk menyusun pedoman atau SOP internal yang secara khusus mengatur pengelolaan biaya lingkungan, sehingga tahapan PPOPET, termasuk evaluasi dan tindak lanjut, dapat berjalan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. 4). Perspektif kelembagaan, rumah sakit dapat mulai mempertimbangkan praktik pembelajaran dari institusi sejenis melalui benchmarking atau adopsi praktik terbaik, sehingga tekanan normatif dan mimetik dalam pengelolaan biaya lingkungan dapat semakin berkembang. 5). Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan atau melakukan studi perbandingan antar rumah sakit, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan *Green Accounting* dan *Environmental Management Accounting* di sektor pelayanan kesehatan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. W., Suwandi, M., Bayan, A. Y. M., & Hanafie, H. (2021). Green Accounting Based Maslahah to Realizing University Social Responsibility in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021)*, *570*(Icebsh), 943–950. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210805.149

Anam, H., & Ramlah. (2020). Penerapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL*, *11*(2), 131–140.

Ashari, M. H., & Anggoro, Y. (2021). the Effect of Green Accounting Practices and Organizational Size in Business Sustainability of Public Hospitals. *Jurnal Akuntansi*, *11*(1), 1–15. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.1-15

Burrit Roger L, Schaltegger Stefan, C. K. (2021). *Putting the Focus on Environmental Management Accounting*. International Federation of Accountans. https://www.ifac.org/knowledge-gateway/discussion/putting-focus-environmental-management-accounting?utm_source

Dengah, D., Tirayoh, V., Latjandu, Lady, Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2024). *PENERAPAN AKUNTANSI BIAYA LINGKUNGAN DI RUMAH SAKIT HERMANA LEMBEAN*. *8*(1), 9–11.

Fitermen, A. R. F., Mintarti, S., & Khairin, F. N. (2025). Environmental Management Accounting Practices In Hospital Waste Management: A Legitimacy Theory Perspective. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(3), 13–21. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.1967

Ghifari, S. M., & Dr. Drs. Rosidi, AK., M. (2018). *Analisis praktik akuntansi dan perlakuan biaya lingkungan pada rsud ngudi waluyo wlingi kabupaten blitar*. *Vol. 7 No. 1*.

Hamid, A., & Garusu, I. A. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Bisnis Dan*

Kewirausahaan, *13*(1), 25–36. https://doi.org/10.37476/jbk.v13i1.4376

Huynh, Q. L., & Nguyen, V. K. (2024). *The Role of Environmental Management Accounting in Sustainability*. 1–21.

Junaidi, M., Wahyuningsih, Y., Martiah, A., & Partayasa, K. (2024). Pengaruh Inovasi Lingkungan, Dukungan Manajemen, Budaya Organisasi Dan Insentif Terhadap Green Employee Involvement. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *9*(2), 156–167. https://doi.org/10.32502/mti.v9i2.8888

Lako, A. (2019). *Conceptual Framework of Green Accounting *. May*.

Norsita, M. (2021). Analisis Penerapan Biaya Lingkungan Pengelolaaan Limbah Cair Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, *4*(1), 54–64. https://doi.org/10.35326/jiam.v4i1.1016

Parikh, K. M., & Sodha. (2025). Beyond financials : a systematic literature review on the role of green accounting in environmental sustainability. *International Journal of Management, Public Policy and Research*, *4*(2), 157–166.

Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (1983). he Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. In *American Journal of Sociology*. The University of Chicago Press.

Rachma, R. A., Inayah, Z., Mindiharto, S. P., & Budiono, N. D. P. (2025). Comparison of Temporary Waste Storage (TPS) Management at Community Health Centres Centres (Puskesmas) with TPS Standards. *Ahmar Metastasis Health JournaL*, *5*(1), 45–53.

Rachman, I. N., & Nahartyo, E. (2024). *Analisis Penerapan Environmental Management Accounting Sebagai Upaya Peningkatan Eko-Efisiensi Pada Rumah Sakit (Studi Pada Rsud Dokter Kanujoso Djatiwibowo Dan Rs X)*.

Refiyani, A., & Putra, S. S. (2023). Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Dalam Proses Pengolahan Limbah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. *Research Journal*, *Vol 3 No 2*.

Samsiar, Lewaru, T. S., & Anakotta, F. M. (2020). *Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RSUD Cenderawasih Kabupaten Kepulauan Aru (Studi Kualitatif)*. *1*(November), 1–12.

Sary, I. G., Utami, H., & Andayani, E. S. (2022). Analysis of Environmental Management Accounting Implementation in RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP)*, *Vol. 5 No.*, pp.27-39.

Setiawati, L., & Sisdianto, E. (2024). Green Accounting Sebagai Strategi Pengelolaan Lingkungan Dan Berkelanjutan Bisnis. *Jma)*, *2*(12), 3031–5220.

Swalih, M. M., Ram, R., & Tew, E. (2024). Environmental management accounting for strategic decision-making: A systematic literature review. *Business Strategy and the Environment*, *33*(7), 6335–6367. https://doi.org/10.1002/bse.3828